

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu keberlanjutan dalam dunia bisnis terus mengalami perkembangan seiring meningkatnya perhatian terhadap dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Perkembangan tersebut mendorong lahirnya kerangka *Environmental, Social, and Governance* (ESG) yang diperkenalkan melalui laporan *Who Cares Wins: Connecting Financial Markets to a Changing World* oleh United Nations Global Compact pada tahun 2004. Laporan tersebut menekankan bahwa perusahaan yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola ke dalam proses bisnisnya memiliki peluang lebih besar untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham maupun pasar modal secara keseluruhan (United Nations Global Compact, 2004). Sejak saat itu, ESG berkembang dari sekadar inisiatif keberlanjutan menjadi kerangka yang digunakan untuk menilai bagaimana perusahaan mengelola risiko dan peluang yang berkaitan dengan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (Tagliatela *et al.*, 2023).

Meskipun ESG terdiri atas tiga pilar yang saling terkait, setiap dimensinya memiliki tingkat perhatian yang berbeda sesuai dengan karakteristik industri (Kakogiannis *et al.*, 2023). Pada perusahaan sektor energi, aspek lingkungan (*Environmental*) memperoleh perhatian yang lebih besar karena aktivitas operasionalnya berkaitan langsung dengan pemanfaatan sumber daya alam serta berbagai dampak terhadap lingkungan. Komitmen

terhadap dimensi tersebut kemudian tercermin melalui keterbukaan informasi mengenai kebijakan, aktivitas, dan kinerja lingkungan kepada para pemangku kepentingan. Praktik tersebut diwujudkan dalam *Environmental Disclosure*, yang menjadi salah satu bentuk implementasi komitmen perusahaan terhadap aspek lingkungan dalam kerangka ESG.

Environmental Disclosure merupakan instrumen penting dalam menjembatani kebutuhan informasi antara perusahaan serta para pemangku kepentingan, khususnya investor, regulator, dan masyarakat (Wei *et al.*, 2024). Pengungkapan ini tidak hanya mencerminkan tingkat kepatuhan perusahaan terhadap regulasi lingkungan, tetapi juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap prinsip keberlanjutan (Lin & Qamruzzaman, 2023). Dalam konteks pasar modal, keterbukaan informasi lingkungan berperan dalam membentuk persepsi risiko dan reputasi perusahaan, sehingga memengaruhi keputusan investasi (D. P. Sari *et al.*, 2025). Dorongan terhadap transparansi ini semakin kuat karena investor kini menempatkan keberlanjutan sebagai bagian penting dalam keputusan investasi, sementara regulator dan *standard setter* juga menuntut informasi keberlanjutan yang lebih relevan, konsisten, dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan (PwC, 2024).

Di Indonesia, komitmen terhadap transparansi lingkungan ini didorong secara regulasi lewat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017, yang mengharuskan emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk menyusun Laporan Keberlanjutan (*Sustainability report*) (OJK, 2022). Pada saat yang sama, Bursa Efek Indonesia juga memperkuat agenda

transparansi ini melalui peluncuran *ESG Reporting* pada 22 Januari 2025 untuk meningkatkan transparansi data ESG perusahaan tercatat (BEI, 2025). Penerapan kebijakan tersebut menjadi salah satu langkah yang ditempuh untuk memperkuat praktik keuangan berkelanjutan serta membantu pencapaian target *Net Zero Emissions* Indonesia pada tahun 2060 (RI, 2021). Regulasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan terhadap dampak lingkungannya.

Tabel 1.1 Perkembangan *Environmental Disclosure* pada Perusahaan Energi yang Terdaftar di BEI Tahun 2021-2024

Tahun	Rata-rata ED	Perusahaan ED=1	Persentase
2021	0,8215	36	55,38%
2022	0,8785	42	64,62%
2023	0,9292	48	73,85%
2024	0,9385	47	72,31%

Berdasarkan Tabel 1.1, rata-rata *Environmental Disclosure* perusahaan sektor energi menunjukkan tren peningkatan selama periode 2021-2024. Rata-rata skor *Environmental Disclosure* meningkat dari 0,8215 pada tahun 2021 menjadi 0,9385 pada tahun 2024. Selain itu, jumlah perusahaan yang mencapai tingkat pengungkapan penuh (ED = 1) meningkat dari 36 perusahaan pada tahun 2021 menjadi 47 perusahaan pada tahun 2024. Temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan energi semakin meningkatkan transparansi lingkungan seiring berkembangnya tuntutan keberlanjutan dan penguatan regulasi terkait pelaporan keberlanjutan.

Tabel 1.2 Perbandingan Tingkat *Environmental Disclosure* Perusahaan Energi Tahun 2021-2024

Kategori	Kode Perusahaan	Rata-rata ED
Tertinggi	BUMI	1,000
Tertinggi	BSSR	1,000
Tertinggi	PTBA	1,000
Tertinggi	TOBA	1,000
Terendah	SMRU	0,100
Terendah	ARII	0,325
Terendah	WOWS	0,475

Namun, tingkat pengungkapan lingkungan antar perusahaan masih menunjukkan variasi yang signifikan, yang mengindikasikan bahwa tidak semua perusahaan memiliki tingkat transparansi yang sama terhadap isu lingkungan (Idris *et al.*, 2024). Berdasarkan Tabel 1.2, terdapat perbedaan yang menunjukkan bahwa perusahaan yang berada dalam sektor industri yang sama dan menghadapi tekanan regulasi yang relatif serupa tetap memiliki tingkat *Environmental Disclosure* yang berbeda. Sebagian perusahaan masih berada pada tahap awal pelaporan keberlanjutan dan cenderung menyajikan pengungkapan yang bersifat umum atau sekadar memenuhi kewajiban regulasi, sehingga kualitas dan kedalaman informasi yang disampaikan menjadi tidak seragam antar perusahaan (Purnamasari & Husin, 2025).

International Energy Agency (IEA) melaporkan bahwa emisi sektor energi Indonesia pada tahun 2021 mencapai sekitar 600 juta ton CO₂ dan menempatkan Indonesia sebagai penghasil emisi energi terbesar kesembilan di dunia. Selain itu, IEA menyatakan bahwa sebagian besar emisi CO₂ sektor energi berasal dari pembakaran bahan bakar fosil, dengan batu bara menyumbang sekitar 53% dari total emisi CO₂ akibat pembakaran bahan bakar

fosil (IEA, 2022). Selain menghadapi tekanan emisi yang tinggi, Reuters (2024) melaporkan bahwa pemerintah Indonesia mempertimbangkan penutupan sebagian unit PLTU Suralaya untuk menekan polusi udara, sementara proses percepatan pensiun PLTU dan transisi menuju energi yang lebih bersih masih menghadapi hambatan pendanaan dan tata kelola. Fenomena ini menunjukkan bahwa isu lingkungan pada sektor energi bukan isu abstrak, melainkan isu operasional dan kebijakan yang berdampak langsung pada risiko bisnis perusahaan.

Penelitian mengenai *Environmental Disclosure* telah berkembang pesat dengan berbagai pendekatan penelitian. Sejumlah penelitian terdahulu banyak mengkaji faktor-faktor tata kelola perusahaan yang berpotensi memengaruhi tingkat pengungkapan informasi lingkungan maupun ESG. Beberapa aspek yang sering menjadi perhatian antara lain ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, juga keberadaan komite audit. Berbagai studi sebelumnya mengungkapkan bahwa mekanisme tata kelola tertentu, seperti independensi dewan dan ukuran dewan, berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan, meskipun tidak semua variabel menunjukkan hasil yang konsisten (Sari & Fitriani, 2023; Ratnani *et al.*, 2026).

Selain itu, sejumlah penelitian turut menyoroti peran karakteristik perusahaan, termasuk ukuran perusahaan, umur perusahaan, serta kinerja lingkungan terhadap kualitas pengungkapan lingkungan, dengan temuan bahwa variabel-variabel tersebut memiliki pengaruh yang beragam dan tidak selalu signifikan (Ratnani *et al.*, 2026). Di sisi lain, sejumlah studi mengaitkan

environmental dan ESG *disclosure* dengan kinerja keuangan maupun nilai perusahaan, yang menunjukkan bahwa pengungkapan tersebut dapat meningkatkan transparansi dan persepsi investor, meskipun dalam beberapa kasus tidak memberikan dampak signifikan terhadap nilai perusahaan (Safriani & Utomo, 2020). Kendati demikian, hasil penelitian sebelumnya masih menunjukkan inkonsistensi temuan serta cenderung berfokus pada faktor-faktor struktural seperti tata kelola dan karakteristik perusahaan, sehingga belum sepenuhnya mampu menjelaskan determinan utama yang mendorong perusahaan dalam melakukan pengungkapan lingkungan secara komprehensif.

Bagaimana sebuah perusahaan merespons isu lingkungan sangat bergantung pada siapa yang duduk di kursi pengawasan dan bagaimana dinamika di dalamnya. Dalam konteks tata kelola keberlanjutan, peran dewan menjadi semakin penting karena isu lingkungan kini tidak lagi dipandang sebagai isu operasional semata, melainkan sebagai bagian dari pengawasan strategis perusahaan (Noor *et al.*, 2024; Nugraha, 2024). OECD dalam *Global Corporate Sustainability report 2024* bahkan menempatkan *sustainability-related disclosure* dan *board responsibilities* sebagai dimensi kunci dalam tata kelola keberlanjutan perusahaan, serta mencatat bahwa perusahaan yang mewakili lebih dari setengah kapitalisasi pasar dunia telah memiliki komite yang mengawasi risiko dan peluang keberlanjutan dan melapor langsung kepada dewan (OECD, 2024). Oleh karena itu, salah satu karakteristik dewan yang paling krusial untuk diteliti kelayakannya dalam mendorong transparansi

adalah ukuran dewan komisaris itu sendiri, atau *Board Size* (Sari & Fitriani, 2023).

Board Size merujuk pada total anggota dewan komisaris yang terlibat pada pengambilan keputusan strategis perusahaan (Noor *et al.*, 2024). Pada praktik tata kelola perusahaan, ukuran dewan menunjukkan sejauh mana perusahaan memiliki sumber daya manusia yang beragam dari sisi keahlian, pengalaman, dan perspektif untuk mendukung fungsi pengawasan dan penentuan strategi (Regina & Agustina, 2025; Tazqy & Arshad, 2024). Dewan dengan jumlah anggota yang lebih besar umumnya memiliki potensi untuk menciptakan keputusan yang lebih komprehensif karena adanya variasi sudut pandang yang dimiliki (Fatmawati & Alliyah, 2023).

Namun demikian, keberadaan dewan dengan jumlah anggota yang lebih besar tidak hanya mencerminkan keragaman perspektif, tetapi juga berkaitan dengan kapasitas sebenarnya dewan dalam merespons kerumitan isu yang dihadapi perusahaan, khususnya isu lingkungan. Perkembangan praktik *corporate governance* menunjukkan bahwa perusahaan semakin memperkuat komposisi dewan dengan menambah variasi keahlian dan latar belakang profesional untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan pengambilan keputusan strategis. Laporan *Board Practices and Composition 2024* mengungkapkan bahwa perusahaan global secara aktif meningkatkan keberagaman kompetensi anggota dewan untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks, termasuk risiko lingkungan dan tuntutan transparansi keberlanjutan. Fenomena ini mengindikasikan bahwa kapasitas dewan tidak

sekadar ditentukan oleh mutu individu anggotanya, tetapi juga oleh jumlah anggota yang memungkinkan distribusi fungsi pengawasan yang lebih efektif (Tonello, 2024).

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa, *Board Size* berpengaruh positif terhadap *Environmental Disclosure* (Almaqtari *et al.*, 2023; Giovany, 2021; Menicucci & Paolucci, 2025; Sari & Fitriani, 2023). Total anggota dewan yang lebih besar dinilai mampu meningkatkan tekanan terhadap manajemen untuk mengungkapkan informasi lingkungan secara lebih luas serta memperkuat tanggung jawab perusahaan kepada *stakeholder*. Namun, penelitian lain menunjukkan bahwa *Board Size* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Environmental Disclosure*, bahkan dalam beberapa kasus ditemukan bahwa ukuran dewan yang lebih besar justru berpotensi menurunkan efektivitas pengawasan karena meningkatkan kerumitan koordinasi dan konflik kepentingan antar anggota dewan (Agnese *et al.*, 2024; Anggraini & Taufiq, 2017; Nisa & Wahyuningrum, 2025; Nugraheni *et al.*, 2021). Ketidaksamaan capaian itu mengemukakan bahwa dampak *Board Size* kepada *Environmental Disclosure* belum konsisten dan bergantung pada konteks penelitian, seperti karakteristik industri, regulasi, dan tata kelola perusahaan. Selain itu, penelitian yang secara khusus menyoroti sektor energi masih terbatas, maka dibutuhkan kajian lebih mendalam untuk mencermati *Board Size* secara lebih lanjut.

Selain ukuran dewan, efektivitas fungsi pengawasan dalam perusahaan juga sangat ditentukan oleh tingkat independensi dewan (Nugraha, 2024; Sari & Fitriani, 2023). *Board Independence* menggambarkan besarnya proporsi

komisaris independen dalam dewan komisaris yang tidak mempunyai keterkaitan keuangan, kepemilikan, juga hubungan keluarga dengan pihak manajemen dan pemangku saham pengendali, agar dapat melaksanakan peran pemantauan dengan independen serta tidak terpengaruh oleh benturan kepentingan. Komisaris independen diharapkan menjadi mekanisme kontrol yang dapat menyeimbangkan kekuasaan manajemen serta melindungi kepentingan pemegang saham dan stakeholder lainnya (Purwitasari & Sriyono, 2025).

Sebuah studi yang dilakukan di Indonesia menunjukkan bahwa *Board Independence* memiliki dampak positif terhadap *ESG disclosure* (Sari & Fitriani, 2023). Temuan ini sejalan dengan penelitian yang memperlihatkan bahwa *Board Independence* berasosiasi positif dengan *Environmental Disclosure* dan *Sustainability reporting* (Almaqtari *et al.*, 2023). Selain itu, penelitian di Eropa dan Afrika juga menemukan bahwa independensi dewan berdampak positif kepada *ESG performance* perusahaan (Agnese *et al.*, 2024; Menicucci & Paolucci, 2025).

Penelitian lain menjabarkan bahwa *Board Independence* berpengaruh negatif signifikan kepada kinerja emisi karbon, yang menandakan bahwa keberadaan komisaris independen tidak selalu mampu meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan. Selain itu, *Board Independence* juga tidak terkonfirmasi memoderasi hubungan antara ESG serta kinerja emisi karbon, sehingga dinilai belum efektif sebagai mekanisme tata kelola dalam mendukung implementasi ESG (Fajriati & Hapsari, 2026). Selain itu, meskipun *ESG*

performance dan *Board Independence* secara langsung berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, *Board Independence* justru melemahkan pengaruh ESG terhadap nilai perusahaan (Chancharat *et al.*, 2026). Hal ini menunjukkan bahwa peran *Board Independence* tidak selalu konsisten dalam mendukung praktik keberlanjutan perusahaan.

Berbeda dengan anggota dewan internal yang memiliki kedekatan dengan operasional perusahaan, komisaris independen cenderung memiliki posisi yang lebih netral sehingga dapat memberikan penilaian yang lebih objektif kepada kebijakan dan keputusan manajemen (Purwitasari & Sriyono, 2025). Ketika perusahaan berupaya mempertahankan persepsi positif, khususnya terkait isu lingkungan, independensi dewan menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa informasi yang diungkapkan kepada publik tidak dimanipulasi atau disembunyikan. Oleh karena itu, independensi dewan tidak sekadar berfungsi sebagai mekanisme pengawasan internal, namun juga sebagai pendorong keterbukaan informasi non-keuangan, termasuk *Environmental Disclosure* (Aulia *et al.*, 2026).

Dalam dinamika pengungkapan informasi lingkungan, perhatian tidak hanya tertuju pada mekanisme pengawasan formal seperti struktur dan independensi dewan, tetapi juga pada bagaimana insentif ekonomi yang melekat pada manajemen memengaruhi keputusan *disclosure*. Kepemilikan saham oleh manajemen (*managerial ownership*) mencerminkan keterlibatan langsung dalam kepentingan finansial perusahaan, sehingga keputusan strategis tidak lagi semata-mata bersifat operasional, melainkan juga

mempertimbangkan implikasi terhadap nilai perusahaan (Sari & Muslimin, 2026).

Dalam konteks tersebut, *Managerial Ownership* menciptakan dorongan bagi manajemen untuk lebih memperhatikan keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen yang memiliki saham cenderung memiliki kepentingan untuk menjaga kinerja dan reputasi perusahaan, termasuk melalui peningkatan transparansi dalam pengungkapan informasi lingkungan (*Putra et al.*, 2025). *Environmental Disclosure* tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan, tetapi juga sebagai sarana untuk menunjukkan akuntabilitas serta komitmen perusahaan terhadap isu keberlanjutan.

Temuan *Putra et al.* (2025) menunjukkan bahwa peningkatan kepemilikan saham oleh pihak manajemen berkaitan dengan semakin luasnya pengungkapan informasi lingkungan, termasuk informasi mengenai emisi karbon. Penelitian lain menunjukkan bahwa *Managerial Ownership* berpengaruh positif sebagai variabel moderasi pada hubungan antara *ESG disclosure* serta *going concern* perusahaan. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa keterlibatan manajemen sebagai pemegang saham dapat memperkuat peran pengungkapan lingkungan dalam mendukung keberlanjutan perusahaan (*Ning et al.*, 2024). Namun, tidak semua penelitian mencapai kesimpulan yang sama. Sejumlah studi menerangkan bahwa *Managerial Ownership* tidak berpengaruh terhadap *Environmental Disclosure* (*Indrasari & Ardhi*, 2017; *K. . Sari & Susanto*, 2021). Ketidaksejajaran hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa pengaruh *Managerial Ownership* terhadap

Environmental Disclosure dapat berbeda pada setiap konteks penelitian, termasuk pada perusahaan sektor energi.

Sejalan dengan teori agensi, hubungan antara pemilik perusahaan serta manajemen rentan terhadap konflik kepentingan karena ketidaksamaan tujuan serta ketidaksamaan informasi. Dalam situasi seperti itu, manajemen cenderung berusaha mengendalikan informasi yang diungkapkan kepada publik, termasuk informasi lingkungan, yang dapat menghambat terwujudnya transparansi perusahaan secara optimal. Oleh karena itu, mekanisme tata kelola perusahaan diperlukan untuk mengurangi konflik dan mendorong pengungkapan informasi (M. Jensen & Meckling, 1976). Dalam konteks penelitian ini, mekanisme tersebut tercermin melalui *Board Size*, *Board Independence*, dan *managerial ownership*. Dengan demikian, penggunaan teori agensi diharapkan dapat menjelaskan bagaimana karakteristik tata kelola perusahaan memengaruhi *Environmental Disclosure* serta menjadi pendekatan yang relevan untuk menjawab ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya (Almaqtari *et al.*, 2023; Sari & Fitriani, 2023).

Selanjutnya, selain variabel *Board Size*, *Board Independence*, dan *managerial ownership*, kajian ini juga memasukkan *Profitability*, *Firm Size* dan *Leverage* sebagai variabel kontrol. Penggunaan ketiga variabel kontrol ini dibutuhkan untuk memastikan bahwa dampak mekanisme *corporate governance* terhadap *Environmental Disclosure* tidak bias oleh karakteristik dasar yang melekat pada perusahaan yang diteliti (Almaqtari *et al.*, 2023).

Profitability dalam penelitian ini diproksikan dengan *Return on assets*. Penggunaan ROA sebagai proksi profitabilitas didasarkan pada asumsi bahwa kemampuan perusahaan pada menghasilkan laba dapat memengaruhi luas pengungkapan lingkungan. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang lebih tinggi cenderung mempunyai fleksibilitas keuangan yang lebih besar untuk membiayai inisiatif lingkungan serta meningkatkan keterbukaan informasi mengenai pelaksanaannya. Tanpa pengendalian ROA, pengaruh *Managerial Ownership* terhadap *Environmental Disclosure* berpotensi tidak mencerminkan hubungan yang sebenarnya, karena peningkatan pengungkapan dapat dipengaruhi oleh kemampuan finansial perusahaan. Selanjutnya dari sisi *Firm Size*, perusahaan berskala besar khususnya di sektor energi umumnya memiliki aktivitas operasional dengan visibilitas dan kompleksitas yang tinggi di mata publik sehingga tekanan eksternal tersebut mendorong perusahaan tersebut untuk melakukan *Environmental Disclosure* sebagai akuntabilitas (Idris *et al.*, 2024; Sari *et al.*, 2025). Terakhir, *Leverage* menunjukkan besarnya peran utang sebagai sumber pembiayaan yang digunakan perusahaan. Dalam perspektif teori agensi, perusahaan dengan *Leverage* tinggi menghadapi pengawasan ketat oleh kreditor sehingga untuk mengurangi biaya keagenan dan meningkatkan keyakinan kreditor bahwa perusahaan mampu memitigasi risiko lingkungan dengan baik, mereka akan terdorong untuk meningkatkan *Environmental Disclosure*. Perusahaan energi yang tercantum di BEI memiliki karakteristik yang membuat isu ini semakin relevan. Perusahaan energi mempunyai risiko lingkungan yang jauh lebih tinggi daripada sektor lainnya, maka ekspektasi

publik terhadap pengungkapan lingkungan (*Environmental Disclosure*) menjadi sangat sensitif terhadap skala perusahaan (*Firm Size*), profitabilitas (ROA) yang menopang investasi teknologi ramah lingkungan, serta tekanan kreditor (*leverage*) dalam konteks pembiayaan transisi energi.

1.2 Rumusan Masalah

Secara teoritis, mekanisme *corporate governance* seperti *Board Size* dan *Board Independence* diharapkan mampu meningkatkan transparansi perusahaan melalui penguatan fungsi monitoring, sehingga mendorong *Environmental Disclosure* (Scholtz & Kieviet, 2026). Selain itu, *Managerial Ownership* diyakini dapat menciptakan keselarasan tujuan antara manajemen serta pemegang saham, yang nantinya dapat mengoptimalkan transparansi perusahaan dalam mengungkapkan informasi lingkungan (Ning *et al.*, 2024; Putra *et al.*, 2025). Namun, hasil empiris menunjukkan inkonsistensi. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa *Board Size* dan *Board Independence* berdampak positif kepada ESG dan *Environmental Disclosure* (Scholtz & Kieviet, 2026; Tagliatalata *et al.*, 2023). Sebaliknya, kajian lain mengungkapkan yakni *Board Size* tidak berdampak kepada pengungkapan informasi lingkungan (Idris *et al.*, 2024) dan bahkan berdampak negatif ataupun tidak signifikan kepada *firm value* (Sari *et al.*, 2025). Lebih lanjut, pengungkapan lingkungan sering kali lebih dipengaruhi tekanan eksternal seperti regulasi dan legitimasi dibanding mekanisme internal perusahaan (Scholtz & Kieviet, 2026). Hal ini mengindikasikan bahwa *peran internal*

governance dalam menjelaskan *Environmental Disclosure* masih belum optimal.

Idris *et al.*, (2024) menunjukkan bahwa implementasi *ESG disclosure* di Indonesia masih terbatas, tercermin dari rendahnya jumlah perusahaan yang memiliki penilaian ESG dibandingkan total yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Permasalahan ini menjadi lebih krusial di sektor energi yang memiliki dampak lingkungan tinggi dan tekanan transparansi yang lebih besar (Maryana & Carolina, 2021). Berangkat dari permasalahan yang sudah dijabarkan sebelumnya, penelitian ini dirumuskan ke dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah *Board Size* berpengaruh terhadap *Environmental Disclosure* pada perusahaan energi di BEI periode 2021-2024?
2. Apakah *Board Independence* berpengaruh terhadap *Environmental Disclosure* pada perusahaan energi di BEI periode 2021-2024?
3. Apakah *Managerial Ownership* berpengaruh terhadap *Environmental Disclosure* pada perusahaan energi di BEI periode 2021-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai hubungan antara mekanisme *corporate governance*, struktur kepemilikan, serta *Environmental Disclosure* pada perusahaan sektor energi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021-2024. Dengan lebih rinci, tujuan penelitian ini yakni untuk menginvestigasi:

1. Pengaruh *Board Size* terhadap *Environmental Disclosure*

2. Pengaruh *Board Independence* terhadap *Environmental Disclosure*

3. Pengaruh *Managerial Ownership* terhadap *Environmental Disclosure*

1.4 Manfaat Penelitian

Temuan penelitian ini dimaksudkan dapat menyumbang kontribusi akademik maupun praktis untuk sejumlah pihak yang berkepentingan. Berikut adalah kontribusi yang ingin diraih:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai bidang akuntansi dan *corporate governance*, khususnya terkait *Environmental Disclosure*. Selanjutnya, penelitian ini juga dapat memperkuat penerapan *agency theory* dalam menjelaskan peran *Board Size*, *Board Independence*, dan *Managerial Ownership* terhadap pengungkapan lingkungan, mengisi celah dalam penelitian, yang hingga saat ini masih menghasilkan temuan-temuan yang tidak konsisten.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dimaksudkan dapat menjadi bahan masukan untuk perusahaan, khususnya sektor energi, pada mengoptimalkan *Environmental Disclosure* lewat penguatan tata kelola perusahaan. Di samping itu, temuan penelitian ini dapat pula membantu investor pada menilai transparansi perusahaan terkait aspek lingkungan.

3. Manfaat Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan untuk regulator, serupa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bursa Efek Indonesia

(BEI), pada menyusun kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas pengungkapan informasi lingkungan, terkhusus di perusahaan sektor energi yang mempunyai pengaruh lingkungan tinggi.

1.5 Sistematika Penulisan

Penyajian penelitian ini disusun ke dalam lima bab yang dirancang secara berurutan untuk menjelaskan pengaruh *Board Size*, *Board Independence*, dan *Managerial Ownership* terhadap *Environmental Disclosure* pada perusahaan sektor energi di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2024.

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN LITERATUR

Bab ini membahas teori yang mendasari penelitian sebagai landasan untuk menjelaskan hubungan antara *corporate governance* dan *Environmental Disclosure*. Selain itu, bab ini juga memuat penelitian terdahulu, kerangka konseptual, serta pengembangan hipotesis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjabarkan metode yang digunakan dalam penelitian, mencakup populasi serta sampel, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, juga teknik analisis data yang diterapkan.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil analisis data yang meliputi statistik deskriptif, hasil pengujian hipotesis, juga pembahasan hasil penelitian yang disangkutkan dengan teori serta kajian sebelumnya.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, juga saran bagi penelitian selanjutnya serta pihak terkait.